

IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIANJUR

Meita Triwendyarti¹, Ednawan Prihana², Yofy Syarkani³
meita.tri576@gmail.com¹, ednawan@gmail.com², yofysyarkani@gmail.com³
Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Edward III. Teori ini menyoroti empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan penerbitan SPP-IRT, hambatan-hambatan dalam penerbitan SPP-IRT, dan dampak penerbitan SPP-IRT terhadap kualitas produk di wilayah Kabupaten Cianjur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Implementasi proses penerbitan SPP-IRT oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur yang bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cianjur, serta BPOM telah berjalan dengan efektif. Walaupun dalam prosesnya ditemukan sejumlah hambatan, seperti: keterbatasan sumber daya, komunikasi yang belum optimal, terutama dengan masyarakat, kesiapan para pelaku usaha, dan implementasi proses penerbitan SPP-IRT oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur yang bekerja sama dengan DPMPTSP Kabupaten Cianjur, serta BPOM telah berjalan dengan efektif. Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi. Selanjutnya, penerbitan SPP-IRT telah membawa dampak positif terhadap peningkatan kualitas produknya, baik dalam hal cita-rasa, kemasan, dan harga yang terjangkau.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, SPP-IRT, Model Implementasi Edward III

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the issuance of Home Industry Food Production Certificates (SPP-IRT) at the Cianjur District Health Office using the perspective of Edward III's policy implementation theory. This theory highlights four main factors that influence the successful implementation of policies, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The purpose of this study was to analyze the implementation of the SPP-IRT issuance policy, the obstacles in issuing SPP-IRTs, and the impact of issuing SPP-IRTs on product quality in the Cianjur Regency area.

The results showed that the process of issuing Home Industry Food Production Certificates (SPP-IRT) at the Cianjur District Health Office has been carried out in accordance with applicable regulations. The implementation of the SPP-IRT issuance process by the Cianjur District Health Office in collaboration with the Cianjur District Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP), and the National Food and Drug Agency (BPOM) has been effective. Although a number of obstacles were encountered during the process, such as: limited resources, suboptimal communication, especially with the community, the readiness of business actors, and the implementation of the SPP-IRT issuance process by the Cianjur District Health Office in collaboration with the Cianjur District Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP), as well as the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM), has been effective. These obstacles can be overcome. Furthermore, the issuance of SPP-IRT has had a positive impact on improving the quality of the products, in terms of taste, packaging, and affordable prices.

Keywords: Policy Implementation, SPP-IRT, Edward III Implementation Model

1. PENDAHULUAN

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan memperkuat sektor ekonomi mikro di Indonesia. IRTP merupakan bagian integral dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tersebar luas di berbagai wilayah dan memiliki kontribusi signifikan dalam penyediaan pangan olahan lokal. Seiring dengan pertumbuhannya, aspek keamanan, mutu, dan gizi produk yang dihasilkan oleh IRTP menjadi perhatian utama, mengingat dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan daya saing produk pangan nasional.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, khususnya pada Pasal 47, tanggung jawab pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan pangan, mutu, dan gizi pangan pada produk pangan olahan industri rumah tangga berada di tangan kepala badan, bupati, atau wali kota secara individual atau kolektif [1]. Ketentuan ini dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam pemberian izin produksi makanan dan minuman, serta pelaksanaan pengawasan post market terhadap IRTP [2].

Untuk menjamin bahwa produk pangan olahan yang dihasilkan oleh IRTP memenuhi standar yang ditetapkan, Pemerintah Daerah, melalui Dinas Kesehatan, memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha IRTP. Di Kabupaten Cianjur, tugas ini diwujudkan melalui beberapa kegiatan utama, salah satunya adalah penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Sertifikasi ini merupakan bentuk jaminan formal bahwa pelaku usaha telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan.

Proses penerbitan SPP-IRT melibatkan kerja sama antara Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Dalam proses ini, Dinas Kesehatan bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi teknis melalui sistem spirt.pom.go.id, sebelum SPP-IRT dapat diterbitkan oleh DPMPTSP. Pelaku usaha wajib memenuhi sejumlah persyaratan utama, antara lain: mengikuti pelatihan penyuluhan keamanan

pangan; menerapkan prinsip Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT); serta memenuhi standar label, iklan, dan penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku [3].

Tidak hanya sampai pada tahap penerbitan, Dinas Kesehatan juga melakukan pengawasan dalam jangka waktu tiga bulan pasca-terbitnya SPP-IRT untuk memastikan pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian, pelaku usaha diberikan waktu maksimal tiga bulan untuk melakukan perbaikan. Selain itu, Dinas Kesehatan juga bertanggung jawab dalam penyusunan standar pelayanan publik yang digunakan sebagai alat ukur kinerja dan untuk memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui mekanisme yang terstruktur ini, Pemerintah Kabupaten Cianjur berupaya menjamin bahwa produk pangan dari sektor rumah tangga tidak hanya aman dikonsumsi, tetapi juga mampu bersaing dalam pasar domestik maupun global. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan pangan, sekaligus memperkuat sistem pengawasan pangan di tingkat daerah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam kondisi alami tanpa intervensi atau kontrol yang ketat, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2020:15) bahwa penelitian kualitatif bertumpu pada filsafat positivisme dan berorientasi pada pemaknaan terhadap gejala sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Cianjur terletak pada koordinat 6°21' - 7°25' Lintang Selatan dan 106°42' - 107°25' Bujur Timur. Secara geografis, kabupaten ini berada di bagian tengah Prov. Jawa Barat dan membentang dari utara hingga selatan. Wilayah Kab. Cianjur terdiri dari 32 kecamatan dan 348 kelurahan. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Kecamatan Cianjur, yang termasuk

[illegible]

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas
Kesehatan Kabupaten Cianjur

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dalam rangka menjamin keamanan pangan masyarakat. Temuan penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DPMPTSP, pelaku usaha PIRT, dan pejabat teknis terkait. Hasil penelitian dianalisis berdasarkan teori Edward III, mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

a. Dimensi Komunikasi

Komunikasi antara instansi pelaksana dan pelaku industri rumah tangga masih menghadapi berbagai kendala. Sosialisasi terkait pentingnya SPP-IRT masih terbatas pada kelompok-kelompok tertentu karena keterbatasan anggaran dan waktu. Media komunikasi yang digunakan pun belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku usaha, mengingat banyak yang tidak memiliki akses atau kemampuan menggunakan media digital. Ketidakterbukaan dan kurangnya komunikasi dua arah menyebabkan pelaku usaha kerap mengalami kebingungan dalam proses pengajuan sertifikat

b. Dimensi Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan. Tenaga teknis yang memiliki kompetensi dalam bidang verifikasi pangan sangat terbatas, sehingga memperlambat proses verifikasi lapangan. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan fasilitas uji laboratorium dan kegiatan penyuluhan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Pelatihan kepada pelaku usaha hanya dapat dilakukan dalam skala terbatas.

c. Dimensi Disposisi Pelaksana

Secara umum, pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan kebijakan SPP-IRT, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Petugas verifikator menunjukkan tanggung jawab tinggi dalam menjaga kualitas pangan, serta bersikap terbuka terhadap keluhan dan umpan balik dari pelaku usaha. Namun, sebagian pelaku usaha

masih belum memahami urgensi sertifikasi karena kurangnya edukasi mengenai keamanan pangan.

d. Dimensi Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam proses penerbitan SPP-IRT masih dinilai rumit dan lambat. Prosedur administrasi yang panjang dan dokumentasi yang kompleks menjadi hambatan bagi pelaku usaha, terutama mereka yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Kurangnya koordinasi antar lembaga terkait juga menyebabkan keterlambatan dalam proses sertifikasi. Sistem birokrasi yang lambat berdampak pada rendahnya tingkat penerbitan sertifikat.

e. Hambatan dan Strategi Pemecahan

Beberapa hambatan utama yang teridentifikasi meliputi kesulitan dalam mengumpulkan peserta penyuluhan, keterbatasan waktu dan akses untuk inspeksi lapangan, ketidaksiapan lokasi produksi, dan ketidaklengkapan dokumen pengajuan. Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Kesehatan dan DPMPTSP menerapkan berbagai strategi seperti percepatan penyuluhan, pembagian tugas tim inspeksi, serta memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memperbaiki tempat produksi tanpa batasan waktu.

f. Dampak Implementasi SPP-IRT

Meski telah dilakukan berbagai upaya, pelanggaran dalam implementasi SPP-IRT masih sering terjadi. Banyak produk PIRT beredar tanpa sertifikasi atau dengan label yang tidak sesuai ketentuan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen terhadap keamanan produk. Kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya izin edar menyebabkan rendahnya kepatuhan terhadap regulasi. Di sisi lain, keberadaan SPP-IRT menjadi instrumen penting dalam menjamin mutu produk pangan, meningkatkan daya saing produk lokal, dan membangun kepercayaan konsumen.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya, penelitian tentang "Implementasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Dinas Kesehatan Kabupaten

Cianjur" mencapai kesimpulan dengan hasil berikut :

1. Proses penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, diantaranya Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Para pelaku usaha diberikan pemahaman melalui penyuluhan mengenai pentingnya SPP-IRT, sehingga mereka antusias untuk melakukan upaya agar usahanya dibekali oleh SPP-IRT. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa implementasi proses penerbitan SPP-IRT oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur yang bekerjasama dengan DPMPTSP Kabupaten Cianjur, serta BPOM telah berjalan dengan efektif.
2. Masih terdapat beberapa kendala dalam proses penerbitan SPP-IRT oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, diantaranya: proses pelaksanaan penyuluhan yang harus diikuti banyak orang, keterbatasan jarak/lokasi, transportasi tim survey ke lokasi usaha, kekurangsiapan pelaku usaha mengikuti proses penerbitan SPP-IRT yang harus dilalui, dan ketidaklengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Namun, kendala-kendala ini dapat diatasi jika Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan Dinas PMPTSP Kabupaten Cianjur bekerja sama dengan baik. Selain itu, semangat para bisnis juga penting.
3. Penerbitan SPP-IRT bagi para pelaku usaha di Kabupaten Cianjur telah membawa dampak positif terhadap peningkatan kualitas produknya. Persaingan antara pelaku usaha berjalan sehat, karena mereka terus berupaya meningkatkan kualitas produknya, baik melalui cita-rasa, kemasan, maupun persaingan harga yang sehat, namun terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Saran

Penelitian ini menyimpulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut berdasarkan temuan di atas :

1. Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur hendaknya terus melakukan peningkatan intensitas dalam sosialisasi pentingnya SPP-IRT bagi para pelaku usaha home industry, dikarenakan masih banyak

pelaku usaha di Kabupaten Cianjur yang belum memiliki SPP-IRT.

2. Perlunya peningkatan komunikasi dan koordinasi diantara instansi terkait dalam penerbitan SPP-IRT, seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur DPMPTSP Kabupaten Cianjur, dan BPOM Cianjur dengan para pelaku usaha. Hal tersebut akan semakin meningkatkan saling pemahaman mengenai pentingnya SPP-IRT bagi para pelaku usaha, serta juga mempermudah proses penerbitannya.
3. Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai penelitian tentang kebijakan penerbitan SPP-IRT, dengan metode yang berbeda dan cakupannya bukan hanya bagi pelaku usaha yang sudah memiliki ijin usaha, tapi juga usaha rumahan yang belum memiliki ijin usaha. Hal tersebut dapat menjadi motivasi bagi mereka untuk tidak hanya mengurus perizinannya, tetapi juga mengikuti proses penerbitan SPP-IRT.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Agustino, L. (2018). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Anggara, S. (2016). Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan. Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2018). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Atmosudirdjo, P. (2019). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Darmadi, H. (2018). Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung: Alfabeta
- Dewi, E. W. (2015). Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Dewi, R. A. K., Asrial, C., dan Rahayu, W. P. (2020). Implementasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga di Provinsi Gorontalo. Jurnal Mutu Pangan, Vol. 7, No. 2
- Effendi, L. (2014). Pokok-Pokok Hukum Administrasi. Malang: Bayumedia Publishing
- Hadjon, P. M. (2017). Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Hamidi. (2014). Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan. Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press

- Handayaniingrat, S. (2014). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan. Manajemen. Jakarta: CV Haji Masagung
- Helmi. (2018). Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika
- Herjanto, E. (2017). Manajemen Operasi. Edisi Ketiga. Jakarta: Grasindo
- Ilmar, A. (2016). Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Kencana
- Islamy, M. I. (2019). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bina Aksara
- Tim Penyusun. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka
- Kriyantono, R. (2018). Teknik Praktis Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media Publik, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kurniaji (2023). Prosedur Proses Sertifikasi PIRT (Pangan-Industri Rumah Tangga) pada UMKM Pasca-Pandemi Covid 19. Jurnal Multidisiplin West Science, Vol. 2, No. 3
- Manan, B. (2018). Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945. Jakarta: Sinar Grafika
- Marbun, S. F. (2017). Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia. Yogyakarta: Liberty
- Maryadi, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Skripsi FKIP Surakarta. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Moleong, L. J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Nawawi, H. dan Martini. (2017). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ndraha, T. (2018). Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineke Cipta
- Ningrat, B. S. (2022). Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Rineka Cipta
- Rasyid, M. R. (2016). *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya
- Ridwan, H. R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ridwan, J. dan Sudrajat, Ach. S. (2019). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Eresco
- Seto. (2016). Studi Kebijakan Keamanan Pangan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 1.
- Siagian, S. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Silvana, A. D. dan Mindiharto, S. (2021). Evaluasi Sop Dan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Di Kabupaten Tuban. *Journal of Public Health Science Research (JPHSR)*, Vol. 2, No. 1
- Suandi, dkk. (2016). *Kebijakan Publik*. Bandung: Widina Bhakti Persada
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2019). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press
- Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Produksi Pangan dan Perusahaan Pangan Industri Rumah Tangga
- Sutedi, A. (2020). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syafie, I. K. (2015). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Thoha, M. (2018). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Peraturan Pemerintah**
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- Peraturan Kepala BPOM No. 9 Tahun 2016 tentang Peredaran Pangan Olahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
- Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Mutu, Keamanan dan Gizi Pangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan